ISSN: 2685-0427

ARAHAN PEMANFAATAN KDP KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN ASPEK ARSITEKTURAL

Yunita Kesuma[1*], Kelik Hendro Basuki[2], Fadhilah Rusmiati[3]

[1, 2, 3] *Program Studi Arsitektur Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung, Bandar Lampung*
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespodensi: yunitakesuma@eng.unila.ac.id

Abstrak

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menjaga eksistensi bahasa daerah dengan meningkatkan peran, fungsi serta pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL). Pembangunan kompleks KBBL yang sedang berjalan kurang maksimal dikarenakan sejak Tahun 2007, telah dilakukan tahap pelaksanaan pembangunan Gedung Perpustakaan KBPL namun pekerjaan tersebut berhenti hanya sebatas pelaksanaan pondasi dan tidak ada pengembangan hingga Tahun 2018. Kendala ini membuat statusnya menjadi tidak fungsional atau kurang dari 60% Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Dengan demikian pihak KBPL membutuhkan rekomendasi atau arahan penanganan terhadap KDP tersebut. Arahan pemanfaatan KDP berupa ruang terbuka hijau publik dibutuhkan untuk mendukung visi KBPL dalam meningkatkan mutu pelayanan dan menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra. Metode pelaksanaa kegiatan ini dimulai dengan inventarisasi kondisi fisik tapak, studi kebijakan dan standar terkait pengembangan ruang terbuka, kemudian merumuskan arahan dan rekomendasi peningkatan ruang terbuka publik. Pengembangan ruang terbuka publik mampu memberikan ruang baru bagi masyarakat agar lebih tertarik dan menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan kearifan lokal. Melalui pengembangan ruang terbuka publik sebagai bentuk peningkatan fisik dari upaya pelestarian kebahasaan dan kesastraan sebagai bagian dari kearifan lokal Provinsi Lampung. Arahan pemanfaatan ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dan pengelola dalam mengembangkan ruang terbuka publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Kata kunci*: Ruang terbuka, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Kantor Bahasa Provinsi Lampung*

1. Pendahuluan

Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL) yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, berada di bawah Pusat Bahasa (Kemdikbud, 2014; p.1). Lebih lanjut dalam buku Profil Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, baik secara teknis maupun administratif, KBPL dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Bahasa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Nomor 157/O/2003), KBPL berdiri pada tanggal 17 Oktober 2003. Namun, karena alasan teknis, KBPL baru dapat beroperasi pada tanggal 1 Juni 2004, Adapun peresmian baru dilakukan (oleh Kepala Pusat Bahasa, Dr. Dendy Sugono) pada tanggal 23 September 2004, bersamaan dengan kegiatan "Sosialisasi Piagam Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pusat Bahasa," yang dilaksanakan oleh Biro Binsos Sekda Provinsi Lampung.

KBPL yang beralamat di Jalan Beringin II, No 40, Komplek Gubernuran Telukbetung, Talang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Lokasi kantor berada di barat daya Balai Keratun Provinsi Lampung, dan Tenggara Kantor BKD Provinsi Lampung. Meskipun terletak di dekat Kantor Gubernur Provinsi Lampung, posisi Kantor Bahasa Provinsi Lampung cukup tersembunyi dan tertutup. KBPL yang berdiri di lahan kurang dari 2500 m² ini memiliki 2 (dua) bangunan utama (Gambar 1), yaitu bangunan Kantor Bahasa (3 lantai) dan Gedung Laboratorium Bahasa (2 lantai).

Gedung kantor utama KBPL (3 lantai) dimulai pembangunannya sejak tahun 2005-2006. Mengingat ketersediaan dananya terbatas,

ISSN: 2685-0427

pembangunan gedung yang berukuran 21 x 12 meter tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap I dilaksanakan pembangunan meliputi pengukuran, pematangan lahan, penalutan, pemagaran, dan pengecoran tiang pancang/pondasi. Tahap II dilaksanakan pembangunan meliputi lantai dasar dan jalan masuk. Hingga tahap ketiga yaitu pada tahun 2007 dilakukan penyelesaian pembangunan tahap III seluas 756 m² dan mulai dapat ditempati oleh berbagai aktivitas KBPL. Pada tahun 2007 juga dilakukan perencanaan pembangunan Gedung ketiga yaitu Gedung Perpustakaan KBPL, yang hingga saat ini (tahun 2018) pelaksanaan hanya sebatas pelaksanaan pondasi dan tidak ada pengembangan hingga selesai pembangunan. Pondasi eksisting ini semula adalah pondasi/ bagian dari perencanaan bangunan Gedung Perpustakaan KBPL kemudian pelaksanaannya terhenti, saat ini mengalami kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 60% dan tidak fungsional. Selain itu, tidak diketahui jumlah lantai dari bangunan Gedung Perpustakaan yang direncanakan Lokasi KDP berada di posisi paling belakang dari tapak (*site*) lahan KBPL. Kondisi ini menyebabkan dari pihak pengurus menemui kendala dalam penanganan KDP. Sehingga dalam hal ini Tim Pengurus KDP mengajukan bantuan teknis kepada Program Studi Arsitektur khususnya tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan rekomendasi pemanfaatan ruang KDP di bawah 60% yang tidak fungsional dalam kompleks Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

2. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode pelaksanaan berdasarkan tahapan kegiatan diantaranya:

a. Tahap persiapan yaitu wawancara, diskusi dengan pihak KBPL, koordinasi tim pelaksana, serta inventarisasi data;
b. Tahap inti, yaitu tahap peninjauan lokasi/*field observation* dari sisi arsitektural untuk memperoleh gambaran fisik tapak melalui pengukuran tapak, topografi, inventarisasi kondisi eksisting tapak, *review* beberapa bangunan penunjang, dan ruang terbuka, serta melakukan pemeriksanaan KDP;
c. Tahap Evaluasi menentukan simpulan dan Rekomendasi, antara lain:
    1) Kesimpulan berupa dasar menentukan arahan atau rekomendasi pemanfaatan KDP pada tapak yang saat ini tidak difungsikan lagi sebagai pondasi Bangunan Gedung Perpustakaan;
    2) Arahan/ Rekomendasi berupa konsep pemanfaatan ruang di atas KDP berupa penyusunan skematik desain Ruang Terbuka Publik (RTP)
    3) Penyusunan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil survey serta diskusi KBPL memiliki 2 (dua) bangunan utama (Gambar 1), yaitu bangunan Kantor Bahasa (3 lantai) dan Gedung Laboratorium Bahasa (2 lantai) yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 1946,34 m² dengan tahap pembangunan sejak tahun 2005-2006. Bangunan eksiting pada kantor tersebut terdiri dari 1 (satu) unit bangunan kantor dengan ketinggian 3 (tiga) lantai, dan bangunan pendopo laboratorium bahasa dengan ketinggian 2 (dua) lantai.

ISSN: 2685-0427

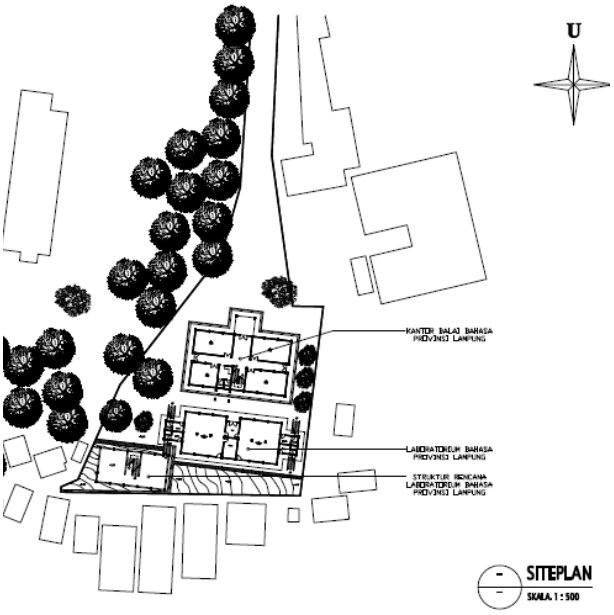

Gambar 1. Gambaran Tapak Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL). Sumber: Dokumentasi Tim, 2018.

Tampilan gerbang KBPL yang menggunakan ornamen Lampung menjadi penanda keberadaannya (Gambar 2). Akses menuju kantor merupakan jalan lingkungan yang cukup kecil dan hanya mengarah ke lokasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung tersebut. Ruang terbuka KBPL yang sempit dengan kondisi tapak diapit oleh kondisi kontur yang cukup terjal (Gambar 3).

Gambar 2. Gerbang Kantor Bahasa Provinsi Lampung. *Sumber: https://www.teraslampung.com di akses tanggal 20 Juni 2018*

Gambar 3. Kondisi Tapak Gedung Perpustakaan KBPL. *Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2018.*

Meski memiliki kontur yang cukup ekstrim dan tapak berbatasan langsung dengan permukiman padat penduduk, sehingga tapak sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau publik. Pemilihan sebagai ruang terbuka hijau selain dari segi kondisi tapak, juga dari segi pendanaan lebih terjangkau. Proses pengembangan sebagai ruang terbuka publik juga tidak memerlukan waktu yang panjang sehingga dapat segera dilaksanakan.

Permasalahan lain kondisi tapak KDP antara lain:

a. Luas lahan yang terbatas dengan kondisi fisik tapak berada di lahan berkontur;
b. Lokasi tapak berada berdekatan dengan permukiman padat penduduk, sehingga perlu pertimbangan persyaratan bangunan gedung dan kinerja dari ketentuan kepadatan berupa kemampuan tapak KDP dalam menjamin kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna serta masyarakat sekitar pada umumnya sesuai kebijakan antara lain: PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Permen PU No.29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung, dan kebijakan lain yang terkait;
c. Berdasarkan topografi, tapak berada di elevasi terendah, menjadikan area tapak sebagai area resapan air (Gambar 5);
d. Terdapat lintasan jaringan utilitas berupa jaringan kabel listrik di atas tapak (Gambar 5);

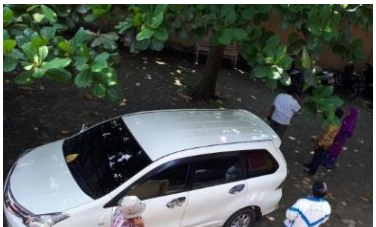

ISSN: 2685-0427

Gambar 4. Kondisi saluran pembuangan air hujan dan Ruang Parkir. *Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2018.*

Gambar 5. Kondisi Tapak berada di kontur terendah dan Kondisi Jaringan Listrik berada melintang di atas tapak. *Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2018*

Ditinjau dari kondisi KDP, bangunan gedung yang direncanakan sebagai Perpustakaan ini dirancang dengan mempertimbangkan kestabilan struktur dan ketahanan terhadap gempa. Ketentuan penataan banguunan yang harus diikuti dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan, dan keserasian lingkungan. Kondisi eksisting bangunan Gedung Perpustakaan yang telah mencapai tahap pembengunan pondasi beton bertulang pada tahun 2007 (Gambar 7) perlu dilakukan peninjauan kelayakan pondasi tersebut untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka publik. Peninjauan pondasi telapak atau *foot plat* yang merupakan pondasi titik yang umumnya digunakan dalam lapisan tanah dengan daya dukung dengan kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah. sehingga membutuhkan perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi yang dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku (Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknik Bangunan Gedung).

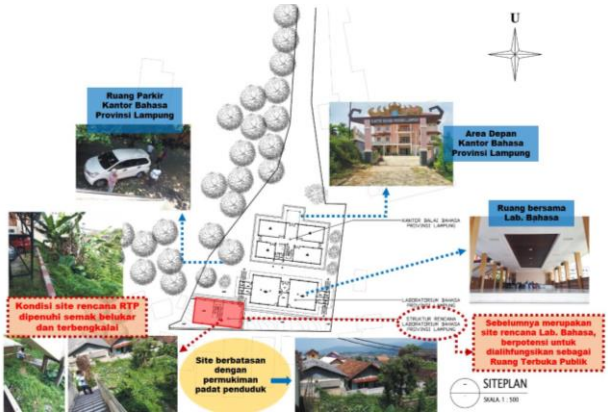

Gambar 6. Gambaran Situasi Tapak Ruang Terbuka Publik. *Sumber: Dokumentasi Tim Unila, 2018*

Terjadinya kerusakan bangunan KDP tergantung pada waktu (*time dependent*) dan penurunan kualitas bangunan dapat ditimbulkan oleh pengaruh gaya yang bekerja dari luar atau dari dalam komponen bangunan itu sendiri. Pengaruh luar, baik secara fisik maupun non fisik dapat mengurangi kualitas bangunan, yaitu gesekan atau benturan. Pengaruh gesekan yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan aus pada komponen bangunan. Pengaruh radiasi matahari dan hujan yang silih berganti dapat menyebabkan terjadinya proses dekarbonasi pada bahan bangunan, yang berakibat pada penurunan kualitas bangunan (Winarsih, 2010 dalam Riskawati, 2015). Menurut Dewi (2013, dalam Riskawati, 2015), bertambahnya usia suatu bangunan akan mempengaruhi kemampuan bangunan tersebut dalam menahan beban. Oleh karena itu, kemunduran kualitas bangunan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari, namun dapat ditekan dengan tindakan pemeliharaan dan perawatan.

Pada kegiatan pengabdian ini juga mempertimbangkan uji ketahanan dan mutu beton. Namun mengingat proses pengujian yang detail dan kompleks, maka salah satu alternatif terbaik dengan mengembangkannya sebagai ruang terbuka publik. Sementara jika nanti akan dibangun menjadi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih, pihak pengelola harus melakukan uji ketahanan dan mutu beton untuk meninjau kelayakan dan kualitas pondasi bangunan.

ISSN: 2685-0427

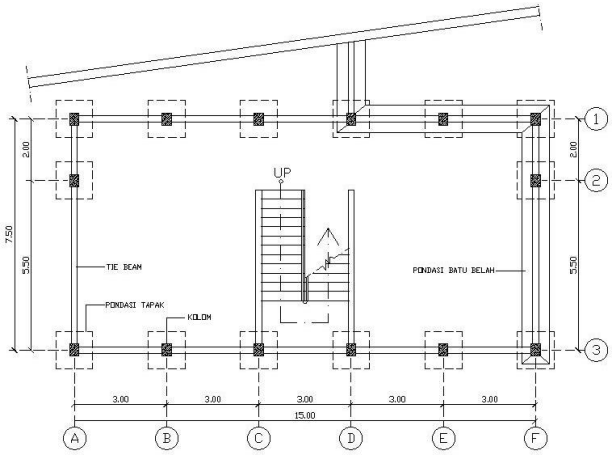

Gambar 7. Gambar Rencana Pondasi Bangunan Perpustakaan Tahun 2007. *Sumber: Dokumen KBPL, 2018*

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, dengan kondisi tapak rencana ruang terbuka saat ini ditumbuhi semak belukar dan cenderung dibiarkan oleh pihak pengurus kantor. Untuk itu, dari kondisi dan potensi tapak dengan kontur ekstrim dan luasan tapak yang sempit, perlu adanya rekayasa penataan yang baik, sehingga seluruh ruang dapat bermanfaat dan memiliki keterkaitan yang mendukung seluruh kegiatan kantor tersebut (Gambar 8). Pada dasarnya fungsi ruang terbuka dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi sosial dan ekologis (Hakim, 2003). Fungsi sosial sebagai tempat beraktivitas, pembatas diantara massa bangunan; sarana penelitian, pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk serta sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, keindahan dan kesadaran lingkungan. Fungsi ekologis untuk memperbaiki kualitas lingkungan serta pelembut arsitektur bangunan.

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan KBPL dengan meningkatkan kualitas ruang terbuka di lingkungan KBBL yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan pelayanan. Dalam pembangunan sarana perlu mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan, dan keserasian lingkungan. Pengembangan ruang terbuka memberikan fungsi sosial dan fungsi ekologis bagi sebuah bangunan. Fungsi sosial sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkegiatan bersama dan saling berinteraksi sosial. Fungsi ekologis untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus sebagai pelembut (*soft space*) pada arsitektur bangunan sekitar KBPL. Pemilihan sebagai ruang terbuka publik pada pemanfaatan KDP selain dari segi kondisi tapak yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan, juga dari segi pendanaan lebih terjangkau. Proses pengembangan sebagai ruang terbuka publik juga tidak memerlukan waktu yang panjang sehingga dapat segera dilaksanakan.

Penyediaan ruang terbuka di KBPL sebagai bentuk pemanfaatan KDP yang terbengkalai, sebelumnya direncanakan sebagai gedung Perpustakaan Bahasa. Meski berada dalam kondisi tapak yang memiliki topografi ekstrim, namun pemanfaatan sebagai ruang terbuka masih dapat dapat diakomodir. Pemilihan elemen pendukung tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan ruang, kapasitas pengunjung serta kenyamanan. Pembangunan ruang terbuka diharapkan mampu menjadi ruang baru untuk berkumpul, berinteraksi hingga mampu menjadi stimulan bagi kreativitas pengunjungnya. Dengan demikian maka pengembangan ruang terbuka pada Kompleks Gedung KBPL nantinya diharapkan mampu mewadahi kebutuhan pembelajaran dan pelayanan tentang bahasa dan sastra Indonesia pada ruang terbuka yang bersifat nonformal.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan demikian, arahan/ rekomendasi pemanfaatan KDP yaitu mengalih-fungsikan menjadi Ruang Terbuka Publik untuk mewadahi kebutuhan pelayanan Gedung KBPL dengan mengangkat konsep ruang terbuka yang rekreatif-edukatif, dimana unsur ruang terbuka masuk ke dalam bangunan dan menyesuaikan kondisi eksisting. Selain kondisi fisik, perlu mempertimbangkan jenis elemen pendukung ruang terbuka publik seperti *sitting place* dan vegetasi.

ISSN: 2685-0427

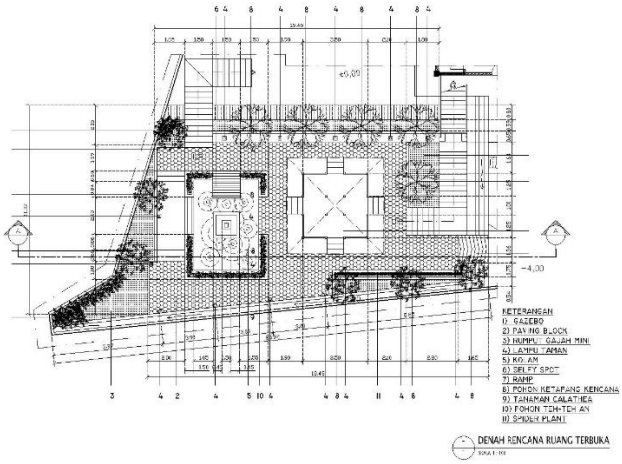

Gambar 8. Skematik desain Denah Ruang Terbuka Publik di atas KDP. *Sumber: Dokumen KBPL, 2018.*

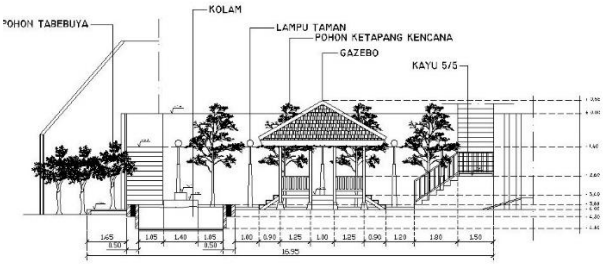

Gambar 9. Tampak Potongan Ruang Terbuka Publik di atas KDP. *Sumber: Dokumen KBPL, 2018.*

Pemilihan elemen pendukung tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan ruang, kapasitas pengunjung serta kenyamanan. Ruang terbuka pubik sebagai salah satu fasilitas yang digunakan sebagai tempat untuk berkumpul dan beraktivitas bersama. Melalui peningkatan ruang terbuka publik diharapkan menjadi bentuk pemenuhan lahan hijau untuk membentuk sebuah estetika kawasan yang lebih menarik. Pengembangan ruang terbuka publik ini mampu memberikan ruang baru bagi masyarakat agar lebih tertarik dan menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan kearifan lokal Provinsi Lampung khususnya di wilayah KBPL. Adanya kesinambungan antar ruang dalam pemanfaatan sebagai upaya optimalisasi ruang dalam dan ruang luar dalam tapak. Peningkatan fasilitas ruang terbuka publik Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan melibatkan institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi bentuk fisik dari upaya pelestarian kebahasaan dan kesastraan sebagai bagian dari kearifan lokal Provinsi lampung.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Fakultas Teknik Unila yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini melalui DIPA Fakultas Teknik Unila. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu Dra. Yanti Riswara, M. Hum., selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL), ibu Maryamah dan rekan di KBPL khususnya tim pelaksana pemanfaatan KDP atas bantuan data dan kerjasamanya. Terakhir ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada Sdr. Wahyu Prasetyo dan Bapak Muh. Rusli Rasyid, serta pihak-pihak yang turut membantu pelaksanaan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

Dewira (2015). Kantor Bahasa Provinsi Lampung Gelar Bengkel Kebahasaan untuk Para Jurnalis dalam *https://www.teraslampung. com di akses tanggal 20 Juni 2018*

Hakim, Rustam dan H. Utomo. (2003). *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap Prinsip- Unsur dan Aplikasi Desain*. Jakarta: Bumi Aksara

Kemdikbud, *Profil Kantor Bahasa Provinsi Lampung* (p.1). 2014.

Pemerintah Indonesia. (2005). *PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. (2006). *Permen PU Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknik Bangunan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara

Riskawati. (2015). Analisas Perbedaan Kekuatan Beton Pada Kolom Bangunan Akibat Tsunami (Studi Kasus Pada Bangunan Mesjid Paya Peunaga). *S2 Tesis* (p.7). Aceh, Indonesia: Universitas Teuku Umar.

.